

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan untuk pemerintah daerah dengan mencakup semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai secara moneter, termasuk segala jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah selama satu tahun (Sari dkk, 2018). Untuk mengelola keuangan dengan baik, pemerintah setempat, termasuk kantor camat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak dan tepat sasaran, evaluasi kinerja keuangan sangat penting. Kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efisien di tingkat lokal menjadi sangat penting dalam lingkungan yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Tinjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja di kantor camat menjadi landasan yang kuat untuk menjamin pertanggungjawaban yang baik terhadap penggunaan dana publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Anggaran negara dan daerah dihitung sesuai dengan perundang-undangan untuk mengelola keuangan negara. Menurut UU No.17 Tahun 2003, rancangan undang-undang tentang laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengandung informasi tambahan tentang kinerja instansi pemerintah, termasuk kinerja yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran terkait dengan anggaran yang telah digunakan.

Menurut Basri (2013), anggaran adalah rencana keuangan untuk tahun berikutnya yang mencakup perkiraan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan transaksi lain. Anggaran diberikan kepada kantor camat setiap tahun untuk berbagai kegiatan dan program. Untuk memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan dengan benar dan mencapai tujuan yang ditetapkan, evaluasi terhadap realisasi anggaran sangat penting. Ini penting untuk kantor camat untuk tidak hanya memperoleh alokasi anggaran yang memadai, tetapi juga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran untuk memastikan bahwa dana yang diterima tidak hanya digunakan untuk mencapai target yang ditetapkan. Salah satu cara untuk bertanggung jawab secara tertulis atas kinerja keuangan adalah dengan menyampaikan laporan keuangan. UU No. 9 Tahun 2005 mengatur pemerintah daerah untuk melakukan upaya kongkrit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sistem akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah harus dibangun dan diintegrasikan dengan sistem perencanaan strategis, penganggaran, dan akuntansi pemerintah. Namun, UU No. 1 Tahun 2004 mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan, yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah.

Menurut Mahsun (2013), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi informasi tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran suatu entitas telah dilaksanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Laporan ini dapat menunjukkan apakah sumber daya yang digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas. Analisis laporan realisasi anggaran belanja membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan karena memberikan gambaran tentang bagaimana kantor camat menggunakan dan mengalokasikan dana yang telah disediakan. Analisis mendalam laporan realisasi anggaran belanja menunjukkan bagaimana setiap rupiah dana publik dikelola oleh kantor camat, yang memungkinkan penilaian tentang sejauh mana kebijakan alokasi dana yang telah ditetap.

Anggaran pemerintah berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah. Anggaran adalah alat penting untuk stabilisasi, distribusi, dan alokasi sumber daya publik, serta untuk perencanaan dan pengawasan organisasi. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran adalah alat ukur finansial yang dinilai mampu menunjukkan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Ini juga merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan instansi tiga daerah yang paling dinilai. Belanja daerah adalah salah satu komponen yang menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, belanja daerah dianggap sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah termasuk dalam belanja daerah, yang mengurangi saldo anggaran yang tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah.

Pelaporan keuangan sektor publik dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya, serta tentang bagaimana entitas mendanai operasi dan memenuhi kebutuhan kasnya. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan suatu entitas untuk membiayai aktivitasnya dan

memenuhi kewajiban dan komitmennya, memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan yang terjadi, dan memberikan informasi secara keseluruhan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010).

Masyarakat harus tahu bagaimana dana publik dikelola. Selain menilai kinerja keuangan, analisis ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kantor camat. Keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana publik sangat penting. Oleh karena itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja kantor camat tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kinerja keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi, menumbuhkan kepercayaan, dan meningkatkan keseluruhan akuntabilitas masyarakat atas penggunaan dana publik secara tepat.

Beberapa waktu terakhir, Kantor Camat Bebandem telah mengabaikan pengelolaan keuangan. Ini terbukti dengan rendahnya penyerapan anggaran belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, ada sisa anggaran yang tidak digunakan. Hal ini menyebabkan asumsi bahwa program kerja belum terpenuhi. Untuk memperbaiki penyusunan anggaran tahun berikutnya, diperlukan proses evaluasi kinerja yang melibatkan pengukuran kinerja konsep *value for money* yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Pengelolaan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan (Sari dkk, 2018). Analisis realisasi anggaran belanja membantu kantor camat membuat perbaikan dan membuat keputusan ke depan; data yang

dikumpulkan dari analisis ini membantu mereka merencanakan anggaran yang lebih baik di masa mendatang. Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap realisasi anggaran belanja, kantor camat dapat lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang mendadak, sehingga mengurangi risiko pengeluaran yang tidak terencana. Pengelolaan keuangan yang lebih terkontrol akan memungkinkan sumber daya yang terbatas digunakan dengan lebih baik.

Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya, dengan judul *“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku”* menemukan bahwa kinerja keuangan berdasarkan analisis tingkat ekonomi tahun 2013-2017 bervariasi di tingkat ekonomi rata-rata sebesar 89,48% dengan kriteria cukup ekonomis hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengekonomiskan belanja sudah cukup baik (Dona & Lestari, 2020). Dien dkk (2015), dengan judul *“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”* menemukan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti akan meneliti laporan realisasi anggaran belanja pada Kantor Camat Bebandem menggunakan tiga analisis: rasio efektivitas, rasio efisiensi belanja, dan rasio ekonomis. Karena itu, judul penelitian ini adalah *“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Camat Bebandem Periode 2021-2023”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan yang ditemukan dari laporan realisasi anggaran belanja pada kantor camat Bebandem periode 2021-2023. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan dari kantor camat Bebandem yang ditemukan dari hasil laporan keuangan periode 2021-2023, yang sebelumnya belum ada peneliti yang meneliti kinerja keuangan dari kantor camat Bebandem.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah penelitian yang secara khusus membahas kinerja keuangan Kantor Camat Bebandem. Penelitian ini akan mengambil data dan informasi dari laporan realisasi anggaran belanja tersebut untuk mengevaluasi pencapaian tujuan keuangan, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah pelaksanaan kinerja keuangan pada Kantor Camat Bebandem sudah berjalan secara efektivitas, efisiensi, dan ekonomis berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja periode 2021-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kinerja keuangan pada Kantor Camat Bebandem sudah berjalan secara efektivitas, efisiensi, dan ekonomis berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja 2021-2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Teori Akuntansi dan Keuangan Publik Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan pelaporan dan analisis realisasi anggaran. Dapat memperkaya literatur mengenai metode dan pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pada tingkat pemerintahan local.
- b. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui analisis laporan realisasi anggaran belanja. Memperkuat teori bahwa analisis laporan keuangan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan.
- c. Pembelajaran dan Pendidikan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pendidikan akuntansi dan manajemen keuangan publik, membantu mahasiswa dan praktisi untuk memahami aplikasi praktis dari teori akuntansi keuangan publik. Dapat menjadi studi kasus dalam mata kuliah terkait pengelolaan keuangan publik, analisis laporan keuangan, dan evaluasi kinerja sektor publik.

2. Manfaat Empiris

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cara mengukur kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran. Sehingga mahasiswa mampu menganalisis dan memberi solusi dengan pengetahuan yang diperoleh.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu informasi yang nantinya digunakan sebagai bahan penilaian kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah serta sebagai bahan referensi untuk dijadikan acuan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

c. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dan bermanfaat sebagai tambahan informasi yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

